

## I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Aset dapat diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan nonlancar (Standar Akuntansi Pemerintah, 2020). Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan atau berupa kas dan setara kas (Standar Akuntansi Pemerintah No 01 Tahun 2020). Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat (Standar Akuntansi Pemerintah No 05 Tahun 2020).

Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas (Standar Akuntansi Pemerintah No 05 Tahun 2020). Menurut Apiaty Kamaluddin (2017:35) barang habis pakai adalah barang/benda kantor yang penggunaannya hanya satu/beberapa kali pakai atau tidak tahan lama. Barang habis pakai selalu dibutuhkan dalam kegiatan sehari-hari, termasuk dalam penyelesaian kegiatan kantor. Oleh karena itu, perlu adanya kegiatan pengelolaan barang habis pakai secara teratur dan terperinci sesuai dengan peraturan yang ada agar kegiatan pemenuhan barang habis pakai yang diperlukan dapat berjalan dengan baik.

Alat tulis kantor termasuk salah satu barang habis pakai yang dibutuhkan dalam kegiatan kantor. Suatu kantor dapat melaksanakan kegiatan perkantoran dengan baik apabila alat tulis kantor memadai. Oleh karena itu, diperlukan kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan barang dalam mengelola alat tulis kantor agar lebih efektif. Untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan dibutuhkan adanya sistem, sistem akuntansi sendiri yaitu organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan (Mulyadi, 2016:3). Sistem akuntansi persediaan bertujuan untuk mencatat mutasi setiap jenis persediaan yang disimpan di gudang (Mulyadi, 2016:463). Sistem ini berkaitan erat dengan sistem penjualan, sistem retur penjualan, sistem pembelian, sistem retur pembelian, dan sistem akuntansi biaya produksi.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pemalang berperan sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). BPKAD Kabupaten Pemalang menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual untuk melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

Sistem persediaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang menggunakan aplikasi berupa *Inventory Control System* (ICS). Sistem aplikasi persediaan ini mulai dipakai oleh BPKAD Kabupaten Pemalang sejak tahun 2021, namun belum berjalan dengan lancar dikarenakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

masih dalam masa uji coba dan belum adanya sumber daya manusia yang cukup untuk mampu mengoperasikan aplikasi tersebut, sehingga sistem persediaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang masih menggunakan sistem manual. Oleh karena itu, penulis memilih untuk membahas Tugas Akhir dengan judul **“Sistem Akuntansi Persediaan Barang Habis Pakai Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pemalang”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Apa kebijakan yang terkait dalam sistem akuntansi persediaan barang habis pakai pada BPKAD Kabupaten Pemalang.
2. Apa metode yang digunakan dalam pencatatan sistem akuntansi persediaan barang habis pakai pada BPKAD Kabupaten Pemalang.
3. Apa saja dokumen dan catatan yang terkait dalam persediaan barang habis pakai pada BPKAD Kabupaten Pemalang.
4. Bagaimana prosedur sistem akuntansi persediaan barang habis pakai pada BPKAD Kabupaten Pemalang.
5. Bagaimana pengendalian internal atas sistem akuntansi persediaan barang habis pakai pada BPKAD Kabupaten Pemalang.

## 1.3 Tujuan

Tujuan pada Laporan Tugas Akhir dengan judul Sistem Akuntansi Persediaan Barang Habis Pakai ini adalah:

1. Menguraikan kebijakan sistem akuntansi persediaan barang habis pakai pada BPKAD Kabupaten Pemalang.
2. Menguraikan metode pencatatan sistem akuntansi persediaan barang habis pakai pada BPKAD Kabupaten Pemalang.
3. Menguraikan dokumen dan catatan yang digunakan dalam persediaan barang habis pakai pada BPKAD Kabupaten Pemalang.
4. Menguraikan prosedur sistem akuntansi persediaan barang habis pakai pada BPKAD Kabupaten Pemalang.
5. Menguraikan pengendalian internal sistem akuntansi persediaan barang habis pakai pada BPKAD Kabupaten Pemalang.

## 1.4 Manfaat

Adapun manfaat yang diharapkan penulis dalam Laporan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis  
Hasil penulisan tugas akhir ini, diharapkan dapat menambah wawasan dan pengalaman bagi penulis mengenai gambaran sistem akuntansi persediaan barang habis pakai pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pemalang.



2. **Bagi Sekolah Vokasi IPB**  
Hasil penulisan tugas akhir ini, diharapkan dapat menambah literasi bagi civitas akademika Sekolah Vokasi IPB dan seluruh mahasiswa khususnya mahasiswa akuntansi. Serta diharapkan dapat menjadi tambahan referensi di perpustakaan Sekolah Vokasi IPB yang diharapkan dapat menambah wawasan bagi pembaca.
3. **Bagi BPKAD Kabupaten Pematang**  
Hasil penulisan tugas akhir ini, diharapkan menjadi referensi dan bahan kajian evaluasi bagi instansi pemerintah selaku Pemerintah Daerah mengenai pelaksanaan sistem akuntansi persediaan barang habis pakai.

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University



**Sekolah Vokasi**  
College of Vocational Studies

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.